

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang berorientasi nonlaba adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335. Sebelumnya standar ini dikenal dengan ISAK 35, namun mengalami perubahan penomoran menjadi ISAK 335 yang telah resmi disahkan pada tanggal 12 Desember 2022 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Pada dasarnya, ISAK 35 merupakan interpretasi yang memberikan pedoman khusus mengenai penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. Interpretasi tersebut disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sejak 11 April 2019. Penting untuk dicatat bahwa penerapan interpretasi ini tidak bergantung pada bentuk atau struktur hukum dari entitas yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap entitas memiliki kebebasan untuk menerapkan ISAK 335 berdasarkan penilaian internalnya, asalkan entitas tersebut memiliki karakteristik sebagai entitas berorientasi nonlaba (IAI, 2024).

Sebelum ISAK 35 diterbitkan, pelaporan keuangan entitas nonlaba mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45. PSAK 45 dengan judul Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang pertama kali diterbitkan oleh DSAK IAI pada 23 Desember 1997, dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2000. Namun, pada 8 April 2011, PSAK 45 mengalami perubahan yang mencakup judul yakni Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan ruang lingkup standar tersebut yang sebelumnya tidak berlaku untuk unit lain atau entitas pemerintah, setelah direvisi menjadi dapat diterapkan oleh unit lainnya dan entitas pemerintah dengan

ketentuan bahwa hal tersebut tidak melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku, kemudian sebelumnya pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK umum, setelah direvisi menjadi pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan (IAI, 2011).

Standar akuntansi keuangan berperan penting sebagai alat komunikasi antara pengelola keuangan dan pemberi dana, guna menunjukkan pertanggungjawaban pada pemanfaatan sumber daya yang dialokasikan melalui penyusunan laporan keuangan (Roziq *et al.*, 2021). ISAK 335 menjelaskan tentang format penyajian laporan keuangan yang terdiri dari lima bagian utama. Kelima laporan tersebut meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sebagai pelengkap informasi.

Salah satu jenis organisasi nirlaba adalah yayasan yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan bahan penelitian dalam penerapan standar akuntansi keuangan. Yayasan yang bergerak di sektor pendidikan, memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Hal ini penting karena laporan keuangan yang transparan dan akurat dapat meningkatkan akuntabilitas yayasan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk donatur, pemerintah, dan masyarakat (Kismawadi *et al.*, 2018). Selain itu, yayasan juga dituntut untuk menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat dengan tujuan memberikan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangannya (Hanida *et al.*, 2024).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Pasal 52 ayat 1-5 menyebutkan bahwa

pengurus yayasan wajib menyusun laporan tahunan yayasan dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Selain itu, Undang-Undang No. 28 tahun 2004 menetapkan bahwa yayasan merupakan badan hukum dengan tujuan utama dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Undang-Undang ini berfungsi sebagai landasan hukum yang membantu masyarakat dalam memahami hakikat dan peran yayasan secara tepat, serta memastikan ketertiban dan kepastian hukum dalam operasional yayasan. Adanya regulasi ini, diharapkan yayasan dapat menjalankan tugasnya lebih jelas dan akuntabel, terutama dalam mengelola dana publik dan menjalankan fungsinya untuk kepentingan umum.

Yayasan yang berperan sebagai lembaga pendidikan dan berbadan hukum memiliki kekayaan (aset) berasal dari pemisahan kekayaan pribadi pendiri, hibah, hibah wasiat, wakaf, serta sumber lainnya (Qurrata A'yun & Riyadi, 2024). Pada dasarnya, seluruh kekayaan tersebut dikelola untuk mendukung tercapainya tujuan yayasan. Yayasan yang memperoleh sebagian atau seluruh sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan dari masyarakat, maupun dari berbagai sumber dana lainnya pada hakikatnya memiliki peran sebagai badan publik. Dengan kedudukannya sebagai badan publik, yayasan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyediakan serta menyampaikan berbagai informasi yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya kepada masyarakat sebagai bagian dari hak atas informasi publik. Informasi yang wajib disampaikan tersebut meliputi laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh yayasan, serta laporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah dikelola. Penyampaian kedua jenis informasi ini sangat penting guna mendukung

terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan, terutama karena yayasan tersebut berstatus sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik (Larasati *et al.*, 2023).

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan penerapan ISAK 35 pada yayasan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Herawati, (2023) mengenai penerapan ISAK 35 dengan objek yayasan santha yana pasek buleleng, belum menerapkan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangannya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wirakrama *et al.* (2023) tentang analisis penerapan ISAK 35 dengan objek penelitian yayasan jember berbagi berkah bersama, laporan keuangannya juga belum sesuai dengan perspektif ISAK No. 35, hanya sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar saja, laporan yang dibuat masih sangat sederhana.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar *et al.* (2023) membahas mengenai bagaimana penyajian laporan keuangan pada entitas berorientasi nonlaba. Dalam penelitian tersebut, objek yang dikaji adalah Pondok Pesantren Modern Al Kautsar Al Akbar yang berlokasi di Medan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pencatatan transaksi keuangan di pondok pesantren tersebut dilakukan dengan metode pencatatan berbasis kas, di mana transaksi baru diakui dan dicatat ketika terjadi penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya memadai untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan pondok pesantren. Salah satu penyebab dari belum optimalnya pencatatan laporan keuangan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, dimana staf yang bertugas dalam proses penyusunan laporan keuangan masih belum memiliki kompetensi atau kemampuan yang memadai di bidang akuntansi. Kemudian penelitian yang diteliti

oleh Susanti *et al.* (2024) pada panti asuhan yayasan swasta mandiri kota Bengkulu secara keseluruhan belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35, namun telah ditemukan juga dalam laporan keuangan yang dibuat oleh panti asuhan yayasan swasta mandiri telah menerapkan ISAK 35 meskipun hanya sebesar 55,55%.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maghfira *et al.* (2022) pada yayasan hati gembira Indonesia diharuskan untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Penyajian laporan keuangan yayasan hati gembira Indonesia per 30 Desember 2020 telah mengadopsi ISAK 35 sesuai dengan aturan terbaru. Hal ini dinyatakan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan nomor dua yang membahas uraian kebijakan akuntansi utama yang mendasari penyajian laporan keuangan. Namun, masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut dalam penyajian laporan keuangan ditahun berikutnya.

Dapat dilihat dari riset yang telah di analisis sebelumnya, besarnya penerapan ISAK 335 pada entitas berorientasi nonlaba masih tergolong rendah. Penelitian ini memiliki kebaruan yang tidak hanya menilai sejauh mana entitas nonlaba telah menerapkan ISAK 335 dalam penyajian laporan keuangannya, tetapi fokus utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kelayakan penerapan ISAK 335 berdasarkan kesiapan internal yayasan. Penelitian sebelumnya terbatas pada pengamatan terhadap penerapan teknis standar, tanpa menelaah kesiapan internal organisasi. Maka di perlukan untuk mengetahui terlebih dahulu kelayakan suatu yayasan dalam penerapan ISAK 335. Kelayakan ini dapat dianalisis melalui indikator penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana yayasan mampu mengimplementasikan standar akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku (Kwalepa *et al.*, 2022). Indikator yang digunakan adalah aspek kesiapan organisasi. Dalam

aspek ini diperlukan untuk menjamin bahwa yayasan mempunyai fondasi dan kesiapan memadai mulai dari staf yang mumpuni dibidangnya serta kelengkapan laporan keuangan dalam menerapkan standar, sehingga dapat menghasilkan bentuk laporan keuangan yang akurat, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan.

Kesiapan organisasi mencakup berbagai faktor yang menunjukkan sejauh mana yayasan memiliki fondasi yang kokoh untuk menerapkan ISAK 335 secara efektif. Kesiapan ini meliputi sumber daya manusia yang kompeten, yang mempunyai keahlian yang cukup mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan standar pelaporan yang diatur dalam ISAK 35 (Kwalepa *et al.*, 2022). Disamping itu, pemahaman mendalam mengenai ISAK 35 dikalangan pengurus yayasan, mulai dari jajaran manajemen hingga staf akuntansi menjadi hal yang tidak kalah penting untuk memastikan penerapan pedoman tersebut dapat berjalan secara teratur dan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang prinsip dasar, prosedur, serta persyaratan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi (Ivatul & Nahar, 2021).

Selanjutnya kelengkapan laporan keuangan merupakan prosedur yang memastikan pengelolaan keuangan yayasan dilakukan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan standar. Hal ini mencakup kerapian dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan, dimana setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat secara teliti (Suarni *et al.*, 2023). Kelengkapan laporan keuangan ini juga menjadi bagian penting yayasan itu sendiri yang akan menyoroti transparansi yang melibatkan keterbukaan dalam pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk donatur sehingga memperkuat kepercayaan publik bahwa yayasan menjalankan fungsi sosialnya dengan

integritas tinggi (Hanida *et al.*, 2024). Selain itu, dalam menjalankan kelengkapan laporan keuangan dengan regulasi yang tepat dan komitmen untuk mempertahankan integritas laporan keuangan (Melia, 2022).

Dengan penerapan yang tepat pada setiap aspek, yayasan akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya tetapi juga memberikan gambaran transparan kepada seluruh pemangku kepentingan (Zakiah, 2022). Laporan yang akurat dan akuntabel ini penting bagi yayasan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik, donatur, dan pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung misi dan keberlanjutan kegiatan yayasan, sehingga dapat terus beroperasi dengan integritas yang tinggi (Afridayani *et al.*, 2022). Namun, jika yayasan belum terpenuhi dari setiap aspeknya maka akan ada beberapa dampak yang mungkin terjadi, seperti kurangnya transparansi keuangan, akuntabilitas yang rendah, potensi masalah hukum dan regulasi, serta pengelolaan keuangan yang tidak efisien.

Yayasan Babus Salam Banyubunih dipilih karena selain berperan dalam kegiatan sosial, yayasan ini juga memiliki lembaga pendidikan yang menjadi bagian penting dari kontribusinya kepada masyarakat. Lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Babus Salam Banyubunih yakni Taman Kanak-Kanak. Yayasan ini memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang. Yayasan Babus Salam Banyubunih memiliki sumber pendanaan yang bervariasi, seperti donasi, hibah yang mendukung operasional pendidikan. Yayasan ini juga memiliki aset tetap yang mendukung kegiatan

pendidikan secara fisik, seperti lahan untuk kegiatan belajar mengajar, bangunan sekolah, dan fasilitas lainnya. Keberadaan aset dan sumber daya ini menjadi modal untuk menunjang tercapainya visi dan misi yayasan dalam lembaganya. Melalui penelitian ini, penerapan ISAK 335 di Yayasan Babus Salam Banyubunih akan dikaji secara mendalam untuk melihat tingkat kesiapan dalam membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Hal ini menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian penerapan laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba dengan judul **“Kelayakan Penerapan Laporan Keuangan Yayasan Babus Salam Banyubunih Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 335”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana kelayakan penerapan laporan keuangan Yayasan Babus Salam Banyubunih berdasarkan ISAK 335 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kelayakan Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 335 pada Yayasan Babus Salam Banyubunih.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan kepada entitas nonlaba, khususnya bagi Yayasan Babus Salam Banyubunih untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 335, jika dalam berbagai aspek sudah terpenuhi. Dan mampu digunakan sebagai masukan bagi para pengambil keputusan khususnya pada pengurus yayasan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan catatan akuntansi.

b. Manfaat empiris

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan disiplin ilmu akuntansi syariah, khususnya dalam hal implementasi standar pelaporan keuangan pada entitas nonlaba. Selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran nyata atas kesiapan yayasan yang mengidentifikasi sejauh mana yayasan telah memenuhi persyaratan akuntansi yang sesuai dengan ketentuan dalam ISAK 335.